

SALINAN KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 102 A TAHUN 1994

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (MURNI)
TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Murni) Tahun 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan guna mencapai hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu menunjuk Pemimpin dan bendaharawan proyek.

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana pada huruf a. Konsideran MENIMBANG ini, dipandang perlu menunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Murni) Tahun 1994/1995 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINSAT : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 Jo. Nomor 16 Tahun 1994;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Th. 1984;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1994, Nomor : 050.12/860/SJ.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 No. 050/4506/021/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II (MURNI) TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pemimpin dan Bendaharawan proyek untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Negara, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemimpin Proyek mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :

- a. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun dari segi keuangan atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya sesuai dengan DIP dan Kontrak dari proyek yang bersangkutan;
- b. Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya;
- c. Menyampaikan laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan;
- d. Membertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan;
- e. Mengadakan pemeriksaan keuangan bendahara proyek yang bersangkutan sedikitnya tiap 3 bulan sekali.

Pasal 3

Bendaharawan proyek mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :

- a. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan per-Undang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas isi keselamatan Kas keuangan proyek yang bersangkutan;
- c. Menyampaikan Laporan Keadaan Kas Proyek (LKKP) setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Cq. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan;
- d. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui posisi keuangan proyek.

- 3 -

Pasal 4

Atasan langsung Pemimpin Proyek berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pemimpin dan Bendaharawan Proyek serta ikut bertanggung jawab membina dalam kegiatan pelaksanaan proyek.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Biaya Administrasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Dati.II (Murni) Tahun 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
ASISTEN I SEKWILDA

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 2 April 1994.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

KEPALA DAERAH/HUKUM

ttc

R. MOHAMAD FARIED, SH

S U H E R M A N, SH

Penate Muda Tk.I

NIP. 010204393

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dati.I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati.II Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati.II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati.II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk.II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Lamongan;
9. Sdr. Pimpinan Cabang SPD Lamongan;
10. Sdr. Kepala Cabang DPUD Rina Marga Propinsi Daerah Tk.I Jatim di Lamongan;
11. Sdr. Kepala Cabang DPUD Pengairan Propinsi Daerah Tk.I Jatim di Lamongan;
12. Sdr. Kepala Cabang DPUD Cipta Karya Propinsi Daerah Tk.I Jatim di Lamongan;
13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROY. INPRES BANTUAN, ABANGUNAN
DATI. II (MURNI) TAHUN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

N A M A				
NO.	PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN	NAMA PROYEK	
1	2	3	4	
1.	Drs. A. JACHJA	S U J A R W O	Biaya Perencanaan Umum dan Pengendalian Program.	
2.	Drs. F. BASUKI	S U J A R W O	Biaya Operasional 10 Sukses	
3.	Drs. MARSUEDI	ABDUL AZIS	Biaya Administrasi dan Koordinasi Pelaksanaan proyek.	
4.	FADELI, SH	KOESNADI	Biaya Pengelolaan Administrasi Keuangan Proyek.	
5.	Ir. SOEDJONO	WIDAYATI	Biaya Perencanaan dan Pengendalian Teknis.	
6.	Dra. GNY KISWATI	PURWATI	Biaya Pengawasan Fungsional.	
7.	Ir. SRI HADI PURWANTI M. TOHA, SH		1. Biaya Pengendalian Administrasi Program Penghijauan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri Kecil; 3. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.	
8.	SUKAMTO, SH	SUTY ATMUDJI	Bantuan Biaya Operasional PKK Kecamatan.	
9.	S U D A R T O	SUTARDJO	1. Peningkatan jalan dan Trotoar Basuki Rakhmad; 2. Rehab jalan dan Trotoar Jl. dr Wahidin S; 3. Pembangunan Trotoar Jl. Veteran utara; 4. Peningkatan jalan Sunan Kalijogo dan A. Yani; 5. Peningkatan Trotoar Jl. KHA Dahlan; 6. Pembangunan Trotoar Jl. P. Sudirman; 7. Pemeliharaan berkala Jalan Soko - Karangbinangun; 8. Pembangunan piengsengan dan Trotoar Jl. di Depan KODIM s/d Jembatan Deket; 9. Pembangunan piengsengan Jl. Jagung Suprpto; 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana Goye Wisata Goa di Reiran; 11. Perluasan Pasar Sidohardjo;	

13. Drs. LILUK SUPRATNI	MUSTOFA NUKTAR	1 - Pelatihan Perencanaan & Tata Laksana Pembangunan Daerah.
12. I S M U N A R T O	LANGENS S.A	1. Penyusunan KURK / RDTRK 2. Penyusunan KURK / RDTRK 3. Penyusunan KURK / RDTRK 4. Penyusunan KURK / RDTRK
11. IV. DONOT SUBAGIO	HERY ERDIAND	- Pendamping satuan PLID/PLIS 1. Penyusunan KURK / RDTRK 2. Penyusunan KURK / RDTRK 3. Penyusunan KURK / RDTRK 4. Penyusunan KURK / RDTRK
10. IV. DONOT SUBAGIO	IV. SUKRIYAH	1. Program Pengembangan Wilayah 2. Program Pengembangan Wilayah 3. Program Pengembangan Wilayah 4. Program Pengembangan Wilayah 5. Program Pengembangan Wilayah 6. Program Pengembangan Wilayah 7. Program Pengembangan Wilayah 8. Program Pengembangan Wilayah 9. Program Pengembangan Wilayah 10. Program Pengembangan Wilayah 11. Program Pengembangan Wilayah 12. Program Pengembangan Wilayah 13. Program Pengembangan Wilayah 14. Program Pengembangan Wilayah 15. Program Pengembangan Wilayah 16. Program Pengembangan Wilayah 17. Program Pengembangan Wilayah 18. Program Pengembangan Wilayah 19. Program Pengembangan Wilayah 20. Program Pengembangan Wilayah 21. Program Pengembangan Wilayah 22. Program Pengembangan Wilayah 23. Program Pengembangan Wilayah 24. Program Pengembangan Wilayah 25. Program Pengembangan Wilayah 26. Program Pengembangan Wilayah 27. Program Pengembangan Wilayah 28. Program Pengembangan Wilayah 29. Program Pengembangan Wilayah 30. Program Pengembangan Wilayah 31. Program Pengembangan Wilayah 32. Program Pengembangan Wilayah 33. Program Pengembangan Wilayah 34. Program Pengembangan Wilayah 35. Program Pengembangan Wilayah 36. Program Pengembangan Wilayah 37. Program Pengembangan Wilayah 38. Program Pengembangan Wilayah 39. Program Pengembangan Wilayah 40. Program Pengembangan Wilayah 41. Program Pengembangan Wilayah 42. Program Pengembangan Wilayah 43. Program Pengembangan Wilayah 44. Program Pengembangan Wilayah 45. Program Pengembangan Wilayah 46. Program Pengembangan Wilayah 47. Program Pengembangan Wilayah 48. Program Pengembangan Wilayah 49. Program Pengembangan Wilayah 50. Program Pengembangan Wilayah 51. Program Pengembangan Wilayah 52. Program Pengembangan Wilayah 53. Program Pengembangan Wilayah 54. Program Pengembangan Wilayah 55. Program Pengembangan Wilayah 56. Program Pengembangan Wilayah 57. Program Pengembangan Wilayah 58. Program Pengembangan Wilayah 59. Program Pengembangan Wilayah 60. Program Pengembangan Wilayah 61. Program Pengembangan Wilayah 62. Program Pengembangan Wilayah 63. Program Pengembangan Wilayah 64. Program Pengembangan Wilayah 65. Program Pengembangan Wilayah 66. Program Pengembangan Wilayah 67. Program Pengembangan Wilayah 68. Program Pengembangan Wilayah 69. Program Pengembangan Wilayah 70. Program Pengembangan Wilayah 71. Program Pengembangan Wilayah 72. Program Pengembangan Wilayah 73. Program Pengembangan Wilayah 74. Program Pengembangan Wilayah 75. Program Pengembangan Wilayah 76. Program Pengembangan Wilayah 77. Program Pengembangan Wilayah 78. Program Pengembangan Wilayah 79. Program Pengembangan Wilayah 80. Program Pengembangan Wilayah 81. Program Pengembangan Wilayah 82. Program Pengembangan Wilayah 83. Program Pengembangan Wilayah 84. Program Pengembangan Wilayah 85. Program Pengembangan Wilayah 86. Program Pengembangan Wilayah 87. Program Pengembangan Wilayah 88. Program Pengembangan Wilayah 89. Program Pengembangan Wilayah 90. Program Pengembangan Wilayah 91. Program Pengembangan Wilayah 92. Program Pengembangan Wilayah 93. Program Pengembangan Wilayah 94. Program Pengembangan Wilayah 95. Program Pengembangan Wilayah 96. Program Pengembangan Wilayah 97. Program Pengembangan Wilayah 98. Program Pengembangan Wilayah 99. Program Pengembangan Wilayah 100. Program Pengembangan Wilayah

1	2	3	4
14. Dra. LULUK S' APTI	SUCIPTO	-	Pelatihan Ketrampilan Kelompok Masyarakat di Desa Tertinggal.
15. K A S R O E N	MULYONO	-	Revisi tahunan Peta Data Pokok Pembangunan Pengadaan dan pelatihan komputer.
16. Drs. HERY PRANOTO	A L I	-	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
17. Ir. PUDYARTONO	Ir. CAHYO PRAYITNO	1.	Pengembangan sengan-Tumpang sa ri Kelapa.
		2.	SLPHT Tanaman Perkebunan.
18. SOENADJI, BA	W A R J I, NS	-	SLPHT Tanaman Pangan.
19. Drs. Es. SOEPRAPTO	W A R J I, NS	-	Pembinaan dan peningkatan mutu benih padi dan polowijo.
20. ACH. CHOZIN	S U W O J O	-	Pendataan Objek dan Subjek PBB.
21. Drs. ABDURACHMAN HADI	SULIKHAH	-	Pemb. Prasarana Pedesaan (RONGGOHADI)
22. MARCUS BASIR	ENDANG KISWATIN	1.	Rintisan wajib belajar;
		2.	Pembinaan pengetahuan dan ketrampilan wanita.
23. Drs. EDI PURWOSANTOSO	SAMSUL ARIFIN	-	Peningkatan populasi ternak.
24. KASROEPIN	HA IDY NURAHM ATIT	-	Pembangunan ruang terbuka hijau kota Lamongan.
25. Dra. SUMAINI	ENDANG SRI ASTUTIK	-	Pendidikan Aparatur.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ASISTEN I SEKWILDA
U.S.
KEP. 3 BAGIAN HUKUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd
R. MOHAMAD FARIED, SH

